

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman semakin banyak fenomena yang dihadapi dan ditemukan didalam kehidupan bermasyarakat diantaranya fenomena dibidang hukum,khususnya kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun sekarang ini kejahatan pencurian banyak dilakukan oleh anak. Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah *delinkuensi* anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, motivasi *intrinsik* dan *ekstrinsik* dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:¹

1. Yang termasuk motivasi *intrinsik* dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi *ekstrinsik* adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;

¹ Wagianti Soetodjo, 2006,*Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama,hal 17

- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media;

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Mezger mendefinisikan tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana.² Menurut J. Baumann memberikan tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.³ Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh adalah Hukum Pidana. Dengan Hukum Pidana pemerintah menetapkan perbuatan – perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru. Pemerintah berwenang untuk memerintahkan para penegak hukum memasuki bidang–bidang baru.⁴

KUHAP Pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah: *Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Di dalam penyidikan penegak hukum kepolisian yang bertugas untuk

² Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, hal 41

³ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hal 42

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta : Fakultas Hukum UMS, hal 2

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana adalah reserse yang salah satunya melakukan penyidikan tindak pidana pencurian. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga bisadilakukan oleh anak dibawah umur salah satunya kasus pencurian yang dilakukan oleh Yayan Zainal Firdaus Bin Abi Khazimin yang berumur 15 tahun yang melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 diduga keras melakukan tindak pidana pencurian di teras rumah Ibu Sri Wahyuni yang terletak di Dusun Walikukun Wetan, Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian berupa: 1 (satu) buah sepeda motor merk Yahama Jupiter Z Nomor Polisi: AE-5513-JX, dengan total kerugian sekira sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 362 KUHP.⁵ Fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan karena sebenarnya anak merupakan aset bangsa, dan masa depan bangsa terletak di tangan anak-anak pada saat ini.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak seperti kasus tersebut, bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari pembangunan yang berlangsung cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informatika, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pengaruh sosial dalam masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku anak. Disamping itu anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih

⁵ Resume Berkas Perkara : BP / 35 / IV / 2014 / SATRESKRIM 10 April 2014 (tidak diterbitkan) Polres Ngawi

sayang dari orang tuanya baik berupa pengawasan, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pembentukan sikap perilaku anak akan mudah terbawa arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang baik yang pada akhirnya akan merusak perkembangan jiwa dan perilaku anak.

Usaha pencarian solusi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Penyelesaian tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Meski demikian, tidak selayaknya apabila sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan orang dewasa. Di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Dalam peraturan tersebut anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum termasuk dalam kelompok kenakalan telah ada pedoman yang pasti mengenai hukum acara terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Tidak terkecuali dalam proses penyidikan yang dilakukan

oleh pejabat polri bahwa terdapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa mulai dari tindakan penangkapan, penahanan, dan juga pemeriksaan tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “PERAN *RESEKSE* DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study Kasus di Polres Ngawi)”’.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran resekse dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi resekse di Polres Ngawi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan peranan reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Ngawimenurut Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi reserse di Polres Ngawi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat

Penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana.
 - 2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
 - 2) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada

dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan.

D. Kerangka Pemikiran

Anak dapat dikategorikan sebagai “anak nakal” bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang. Pemberian kategori “anak nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan dimuka hukum. Dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (duabelas) tahun maka Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur *minimum (minimum age floor)* bagi Anak Nakal (*delinquent child*). Salah satu tindak pidana yang dilakukan anak sekarang ini bukan hanya kenakalan biasa saja namun juga marak adanya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP :⁶

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Proses peradilan pidana haruslah melalui beberapa tahap sebelum lebih jauh memasuki peradilan, tahap awal yang dilakukan yaitu adanya penyidikan. Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau

⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 1

siasat(Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam pasal 1 angka 2, sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang.⁷

Memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut:⁸

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan
- e. Pembuatan berita Acara Penyidikan.

Penegakan hukum sesuai sistim peradilan pidana, khususnya polri bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi reserse kriminal polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peran penyidik polri dalam sistim peradilan

⁷ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta : UII Press, hal 63

⁸ *Ibid.*, hal 64

pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.⁹Tahap awal yang dilakukan oleh penyidik yang pelaku atau korbannya anak sekarang ini menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan *Restorative justice*. Menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat local, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹⁰ Keadilan restorative (*Restorative Justice*) adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.¹¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

⁹Yesmin Anwar dan Adong, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjadjaran, hal 283

¹⁰Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal 196

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung : Refika Aditama, hal 31

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”¹²

Berdasarkan pendapat Friedman di atas diketahui bahwa struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.¹³ Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*¹⁴

¹²M.Friedman, Lawrence, *American Law an Introduction*, <http://zenhadianto.blogspot.com>, didownload Senin 27 Oktober 2014, Pukul 23.16 wib

¹³Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Chalia Indonesia, Hal 8

¹⁴ M. Friedman, Lawrence, *Op.Cit*,

Friedman juga menjelaskan bahwa aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*¹⁵

Berdasarkan pendapat Friedman di atas dapat dipahami bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata

¹⁵ *Ibid.*, M. Friedman, Lawrence

lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Adapun dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini maka penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan atau digunakan sebagai materi atau beberapa cara, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang bagaimana peranan reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang akan disajikan dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara langsung.

¹⁶Munir, Fuady, 2003, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Low dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 40

¹⁷Ali, Achmad, 2002, *Op.Cit*, hal97

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan dalam memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan mengenai peran reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Ngawi.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer menurut Hilman Hadikusuma adalah “data dasar”, “data asli” yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹⁸Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu berasal dari hasil wawancara dengan penyidik di Polres Ngawi.

¹⁸Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 65

b. Data Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah-makalah, dan literature karya ilmiah yang terkait dengan penelitian peran reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang

berkaitan dengan peran reserse dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan.¹⁹

F. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori skripsi yang meliputi : Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Reserse, Tinjauan Umum

¹⁹Soerjono Soekanto, 2008,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hal 5

Tentang Anak, Tinjauan Tentang Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai peran reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hambatan apa yang dihadapi reserse di Polres Ngawi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.